

LAPORAN PENELITIAN

PENGARUH ASSET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP *EARNING MANAGEMENT*

(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor *Property, Real Estate and Building Construction* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)



TIM PENELITIAN :

Sulistyowati, SE, M.Ak	NIDN 0326097701
Hendrawati, SE, M.Ak	NIDN 0308116401
Flourien Nurul Ch, SE, MSi, Ak	NIDN 0301037701
Ir. Dwi Windu S., MS	NIDN 0327076101
Fanisyah Maliki, SE, M.Ak	NIDN 0304077503
Said Khaerul W, SE, Ak, M.Ak, CA	NIDN 0320126901

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
JAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENGARUH ASSET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP *EARNING MANAGEMENT* (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak serta merta hadir tanpa bantuan dan dukunngan dari semua pihak. Semoga arahan motivasi dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah sehingga memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaaan atau tulisan penulis berikutnya. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi ilmu perpajakan dan dapat diterapkan.

Jakarta, November 2020

Penulis,

Sulistiyowati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1. Pengertian Pajak.....	10
2.2.2. Objek Pajak	11
2.2.2.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak.....	11
2.2.2.2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak	13
2.2.2.3. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final	15
2.2.3. Pajak Tangguhan.....	16
2.2.3.1. Aset Pajak Tangguhan	16
2.2.3.2. Beban Pajak Tangguha.....	18
2.2.3.3. Penentuan Pajak Tangguhan.....	19
2.2.3.4. Pengakuan Pajak Tangguhan	19
2.2.3.5. Pengukuran Pajak Tangguhan	19
2.2.3.6. Penyajian Pajak Tangguhan.....	20
2.2.3.7. Pengungkapan Pajak Tangguhan.....	20

2.2.4. Pajak Penghasilan	21
2.2.5. <i>Book Tax Differences</i>	22
2.2.5.1. Perbedaan Temporer atau waktu.....	23
2.2.5.2. Perbedaan Permanen.....	26
2.2.6. <i>Earning Management</i>	29
2.2.6.1. Teori Manajemen Laba.....	30
2.2.6.2. Motivasi Manajemen Laba	33
2.2.6.3. Metode Manajemen Laba	34
2.3. Pengembangan Hipotesis	35
2.4. Kerangka Konseptual Penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	38
3.2 Tahapan Penelitian.....	38
3.3 Data dan Sampel Penelitian	39
3.3.1 Data Penelitian	39
3.3.2 Sampel Penelitian.....	39
3.4 Definisi dan Operasional Variabel.....	42
3.4.1 Variabel Dependen (Y)	41
3.4.2 Variabel Independen (X).....	41
3.5 Strategi Penelitian	43
3.6 Model Pengujian Hipotesis	43
3.7 Pengujian Hipotesis	44
3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)	44
3.7.2 Uji t.....	44
3.7.3 Uji F	44
3.8 Metode Analisis Data.....	45
3.8.1. Statistik Deskriptif	45
3.8.2. Pendekatan Model Regresi Data Panel	46
3.9 Pemilihan Model Data Panel	48

3.10	Statistik Deskriptif	49
3.11	Uji Asumsi Klasik.....	50
3.11.1.	Uji Normalitas.....	50
3.11.2.	Uji Multikolonieritas.....	50
3.11.3.	Uji Heteroskedastitas	51
3.11.2.	Uji Autokorelasi.....	51
3.12	Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya	52
3.12.1.	Jadwal Kegiatan	52
3.12.2.	Realisasi Biaya.....	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	53
4.2	Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis	54
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	54
4.2.2	Pemilihan Model	56
4.2.2.1.	<i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	56
4.2.2.2.	<i>Hausman Test</i>	57
4.2.2.3.	<i>Langrange- Multiplier Test</i>	58
4.2.3	Kesimpulan Pemilihan Model	59
4.2.4	Analisis Regresi Data Panel.....	60
4.2.5.	Pengujian Hipotesis	61
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	63
4.3.1	Pengaruh asset pajak tangguhan terhadap <i>earning management</i>	63
4.3.2	Beban pajak tangguhan terhadap <i>earning management</i>	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran dan Keterbatasan	66
PENUTUP		67
DAFTAR PUSTAKA		68

LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Periode Tahun 2015-2019.....	1
2. Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel.....	40
3. Tabel 3.2 Daftar Sample Penelitian	40
4. Tabel 3.3 Operasional Variabel	42
5. Tabel 4.1 Hasil Nilai Perusahaan	53
6. Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	55
7. Tabel 4.3 Hasil Pengujian <i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	57
8. Tabel 4.4 Hasil Pengujian <i>Hausman Test</i>	58
9. Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Langrange - Multiplier Test</i>	59
10. Tabel 4.6 Hasil Kesimpulan	59
11. Tabel 4.7 Analisis Regresi Data Panel	60
12. Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	61
13. Tabel 4.9 Hasil Regresi Uji Statistik t – X_1	62
14. Tabel 4.10 Hasil Regresi Uji Statistik t- X_2	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Gambar 2.1 Kerangka konseptual	37
2. Gambar 3.1 Bagan Tahap-tahap Penelitian	38

**“PENGARUH ASSET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN
PAJAK TANGGUHAN TERHADAP *EARNING
MANAGEMENT*”**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor *Property, Real
Estate and Building Construction* yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 -2019)”**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning management*.

Laporan keuangan perusahaan dihasilkan dan disiapkan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada investor sehingga mencerminkan aktivitas perusahaan. kewajiban tersebut tidak terbatas pada kepentingan manajemen tetapi juga untuk kepentingan otoritas pajak. Adanya perbedaan kepentingan dan informasi tersebut memacu manajemen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi angka angka akuntansi tersebut dapat berupa manajemen laba melalui aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan.

Sampel ditentukan berdasarkan metode *purpose sampling* terhadap perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dengan jumlah 81 perusahaan. Sampel ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 perusahaan, sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 40 observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diunduh melalui situs resmi IDX: www.idx.co.id. Data di analisis dengan menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *software Eviews* versi 10.0. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa: 1) Aset Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Earning Management*. 2) Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap *Earning Management*

Kata Kunci : Asset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan *earning management*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Negara setiap tahunnya meningkat dan penerimaan Negara yang terbesar berasal dari pajak. Realisasi penerimaan Negara periode untuk tahun 2015 – 2019 terlihat pada tabel 1.1 yang berasal dari pajak merupakan penerimaan atau pendapatan Negara yang terbesar, setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Penerimaan dari sektor pajak pada tahun 2015 sebesar 82,91% atau Rp.1.240.418.000 dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 yaitu mencapai 80,96% atau sebesar Rp.1.643.083.000

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara
Periode Tahun 2015-2019
(dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Pajak		Bukan Pajak		Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2015	1.240.418	82,91	255.628	17,09	1.496.047	100
2	2016	1.284.970	83,06	261.976	16,94	1.546.946	100
3	2017	1.343.529	81,19	311.216	18,81	1.654.746	100
4	2018	1.518.789	78,77	409.320	21,23	1.928.110	100
5	2019	1.643.083	80,96	386.333	19,04	2.029.417	100

Sumber : <https://www.bps.go.id> diolah, 2020

Bagi pemerintah, dalam hal ini instansi pemerintah yang terkait merupakan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam suatu kebijakan atau suatu aturan yang telah diatur dalam Undang- Undang Perpajakan bahwa laba yang diperoleh oleh wajib pajak baik orang pribadai maupun badan wajib untuk melaporkan laba yang

diperolehnya. Laba yang dilaporkan perusahaan menjadi dasar dalam penetapan pengenaan pajak.

Perbedaan kepentingan dari pemerintah yang mengharapkan penerimaan pajak yang besar dan terus menerus tentu saja bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan membayar pajak seminimal mungkin. Di sisi lain, bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih. Hal tersebut dapat menimbulkan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap pembayaran pajak.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Pada umumnya manajemen perusahaan menginginkan menaikkan laba yang dilaporkan oleh para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya, sehingga banyak manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba pada perusahaannya dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan dan meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Fenomena yang terjadi adalah timbulnya masalah keagenan yaitu hubungan antara principal dan agen yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan principal dan atas tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Perusahaan berusaha itu, manajer perusahaan kemudian berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan eksternal lainnya.

Karena adanya perbedaan metode perhitungan dan pencatatan antara akuntansi dengan perpajakan maka menyebabkan terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang dapat menimbulkan selisih besarnya laba yang diperoleh. Maka, perlu dilakukannya penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal akan menghasilkan dua koreksi yang dinamakan berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Pajak tangguhan merupakan perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi PPh yang timbul akan

datang sebagai akibat adanya perbedaan nilai aset dengan beban antara perhitungan menurut akuntansi dengan menurut perpajakan.

Perbedaan temporer dapat timbul apabila penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi yang berbeda dengan periode saat penghasilan atau beban tersebut diakui dalam perhitungan laba fiskal, misalnya perbedaan metode penyusutan dan masa manfaat yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan temporer kena pajak tersebut menyebabkan timbulnya beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.

Besarnya pajak tangguhan bersih berpengaruh terhadap pembayaran pajak dimasa depan yang tercermin pada pajak kini di tahun mendatang. Pembalikan perbedaan temporer akan mempengaruhi pembayaran pajak di masa yang akan datang. Misalnya, pembalikan kewajiban pajak tangguhan akan menyebabkan pembayaran pajak masa yang akan datang, sementara pemulihan aset pajak tangguhan akan mengurangi pembayaran pajak masa depan. Pembayaran pajak yang semakin meningkat atau semakin menurun akan berpengaruh pada laba bersih yang dihasilkan. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, semakin besar beban pajak yang dibayarkan maka semakin kecil laba bersih yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya.

Perbedaan permanen timbul akibat adanya perbedaan pengakuan transaksi antara peraturan akuntansi dan peraturan pajak. Beda tetap atau beda permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam satu ukuran laba, tetapi tidak dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan kata lain, jika suatu item termasuk ukuran laba akuntansi, maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya (Wijayanti, 2006). Misalnya bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui dalam laba fiskal, contoh lain dapat kita lihat pada laba yang diperoleh anak perusahaan diakui sebagai laba akuntansi namun bukan merupakan objek pajak. Sehingga dapat mempengaruhi jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Oleh karena angka-angka akuntansi sangat penting dalam banyak pengambilan keputusan dan laba yang dilaporkan merupakan angka yang

memperoleh perhatian paling banyak baik dari pihak internal maupun eksternal, serta digunakan sebagai indikator penilaian kinerja. Perilaku manajemen laba dimungkinkan dapat terjadi karena manajemen mempunyai informasi lebih banyak dan lebih akurat dari pada pihak stakeholder, maka angka ini pulalah yang paling mungkin dimanage oleh manager. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Irham Fahmi (2014, 517) “manajemen laba (*earnings management*) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*)”.

Hubungan antara beban pajak tangguhan dan asset pajak tangguhan sangat erat dalam mendeteksi perilaku *earning management* yaitu memaksimalkan bonus yang mereka dapatkan dengan merekayasa angka akrual dan berusaha meminimalkan pajak yang mesti mereka bayarkan, dengan cara meningkatkan akrual untuk menjadikan angka lebih rendah.

Pengakuan pajak tangguhan dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya laba bersih karena adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan asset dan pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini, menjadi celah bagi management untuk memanipulasi jumlah dari laba bersih sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar

Terkait kasus manajemen laba tersebut yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan telah dijelaskan sebelumnya dapat menimbulkan dampak negatif karena melakukan rekayasa laporan keuangan yang mengakibatkan hasil yang tidak wajar dan menutupi keadaan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam beberapa hal untuk manajemen laba boleh dilakukan untuk tingkat level tertentu dengan memberikan informasi nilai keuangan yang baik dan efisien serta penggunaan metoda akuntansi yang sesuai dengan aktivitas operasional perusahaan sehingga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan tidak merugikan pihak ketiga karna manajemen perusahaan melakukan manajemen laba.

Alasan penulis memilih perusahaan Perusahaan property, real estate dan building constructions merupakan industri yang bergerak dibidang pembangunan gedung. Hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sektor ini merupakan sektor yang memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang terus bertambah besar dan mempunyai karakteristik yang sangat sulit untuk diprediksi dan berisiko tinggi. Hal ini sulit di prediksi sebab pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi industri property, real estate dan building constructions mengalami perkembangan dan peningkatan permintaan yang pesat, namun jika pertumbuhan ekonomi menurun maka industri ini mengalami penurunan yang sangat drastis.

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Timurianan dan Rizki (2015) mengatakan bahwa adanya pengaruh dari aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, M & Nera, M (2019) mengatakan bahwa aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, akan tetapi perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian Maulana (2015) menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba penelitian dilakukan pada perusahaan *Food & Beverage* terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan periode penelitian ini adalah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP EARNING MANAGEMENT (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management* pada perusahaan sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di BEI?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management* pada perusahaan sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di BEI?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh asset pajak tangguhan terhadap *earning management*
2. Mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *earning management*

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi penulis
Untuk mengetahui wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning management* pada perusahaan sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
2. Bagi manajemen
Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas *earning management* atau manajemen laba.
3. Bagi akademisi
Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada konsentrasi akuntansi keuangan mengenai *earning management*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan dengan berbagai informasi dari penelitian dan jurnal-jurnal yang telah ada untuk dijadikan pendekatan dan perbandingan terhadap keterkaitannya dengan judul penulis mengenai adanya pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning manajemen*. Berikut daftar penelitian terdahulu yang dipakai oleh penulis sebagai referensi :

Putra, dkk (2019). Melakukan penelitian pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kemudian beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Penelitian yang dilakukan oleh Lucy (2016) terkait dengan pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak tangguhan terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2013 dengan teknik *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan model regresi logistik binary dengan bantuan perangkat lunak yaitu SPSS versi 20.0 menghasilkan bahwa aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Selanjutnya Syilvia (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan *debt equity ratio* terhadap praktik manajemen laba dengan menggunakan metoda kuantitatif untuk sampel yang ditentukan menggunakan *purposive sampling* menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan *debt to equity ratio* dan beban pajak tangguhan tidak pengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatu (2017) terkait pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan menggunakan metode kuantitatif serta untuk pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 5% maka penelitian menghasilkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisudaningtyas (2017) terkait analisis pengaruh perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan *property, real estate and building construction* yang terdaftar di BEI Periode 2015-2017 menggunakan metoda kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel dengan hasil pengujiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh dari aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba sedangkan dari perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Lutfi, dkk (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan regresi berganda hasilnya menyatakan bahwa beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlim and Arisman (2019) mengenai “*The Influence of Debt Tax Load, Profitability and Tax Planning on Profit Management*” dengan menggunakan metoda kuantitatif hasilnya menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan profitabilitas dan perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan untuk melakukan manajemen.

Gian and Luqman (2019) melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai “*The Influence of the Tax Charges, Tax-Deferred and Planning, Against Earnings Management*” dengan menggunakan metoda kuantitatif. Hasil penelitian

ini menyimpulkan bahwa pajak memungut pajak secara simultan tanggihan dan perencanaan tidak akan mempengaruhi manajemennya dan beban tanggihan memengaruhi manajemen laba proyek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak Tanggihan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba dan variabel Aktiva Pajak Tanggihan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Manajemen Laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran berupa uang bukan barang;
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari dua fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan sebagai alat pengaturan. Sehingga kepatuhan subjek pajak dalam membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Namun di sisi subjek pajak, membayar pajak selain berarti menjalankan kewajiban sebagai warga negara atau badan yang

berkedudukan di dalam sebuah negara, juga berarti mengurangi pendapatan perusahaan dari bisnis yang dilakukan. Tingginya tarif pajak membuat perusahaan mencari cara untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya.

2.2.2. Objek Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun aslinya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Diihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerja dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari dokter, notaris dan lain-lain
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

2.2.2.1. Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada

- perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengantisaham atau penyertaan modal;
- ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, danaturut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividendariperusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagiannya hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008

penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - i. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - ii. dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggotanya dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang

unitpenyertaankontrak investasi kolektif;

- k. dihapus;
- l. Penghasilan yangditerimaataudiperolehperusahaan modalventura berupabagianlabadaribadanpasangan usahayang didirikanandanmenjalankanusahaatau kegiatan diIndonesia, dengan syaratbadan pasangan usahatersebut :
 - i. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atauyang menjalankankegiatandalamsektor- sektorusahayang diaturdenganatauberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - ii. sahamnyatidakdiperdagangkandibursaefekdi Indonesia.
- m. Basiswayang memenuhipersyaratantertentuyang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlabayangbergerakdalambidangpendidikan dan/ataubidang penelitiandanpengembangan,yang telahterdaftarpadainstansiyang membidanginya,yang ditanamkembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikandan/atau penelitian dan pengembangan,dalamjangkawaktupaling lama4 (empat)tahunsejakdiperolehnya sisa lebihtersebut, yang ketentuanyadiaturlebihlanjutdenganatau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- o. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan PenyelenggaraJaminanSosialkepada Wajib Pajak tertentu,yang ketentuanyadiaturlebih lanjutdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.2.3. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final

BerdasarkanPasal4ayat(2)Undang-UndangNomor36tahun 2008

penghasilanyangdikenakan PPh Final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,bungaobligasi dan surat utang negara, dan bungasimpananyang dibayarkanolehkoperasikepada anggotakoperasi orangpribadi;

- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasungannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.3. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dalam aspek perpajakan adalah beban pajak atau manfaat pajak yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Sedangkan dalam sudut pandang akuntansi, pajak tangguhan dapat dipahami dari dua sudut yaitu sebagai akun aset dan liabilitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 bertujuan mengatur perlakuan untuk PPh saja, khususnya pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkepentingan pada PSAK Nomor 46. Wajib pajak menerapkan PSAK Nomor 46 dalam rangka penyusunan laporan keuangannya.

2.2.3.1. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang (mengurangi laba fiskal dimasa yang akan datang) pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal dimasa datang memadai untuk dikompensasi. Beberapa transaksi yang dapat memunculkan aset pajak tangguhan diantaranya piutang tak tertagih

(*uncollectible accounts receivable*), jaminan (*warranty*), sewa (*lease*), persediaan dan kerugian operasi bersih (*net operating losses*).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi karena perusahaan membayar pajak dengan jumlah lebih besar dari yang disajikan didalam laporan keuangan, otoritas pajak mengakui pendapatan atau beban pada waktu yang berbeda dengan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya dan/atau perusahaan membayar pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo (pajak dibayar dimuka). Sebagai contoh perhitungan untuk aset pajak tangguhan dibawah ini :

PT ABC memperoleh pendapatan dari penjualan sebesar IDR 5.000. PT ABC memperkirakan rata-rata klain garansi sebesar 2% dari total penjualan. Pada tahun pelaporan, perusahaan tidak menerima klaim. Dalam laporan laba rugi, PT ABC akan melaporkan penjualan dan beban garansi tersebut sebagai berikut :

Keterangan	Nilai
Pendapatan	5.000
Beban garansi	100 (2% x 5.000)
Laba sebelum pajak	4.900
Beban pajak penghasilan	980 (20% x 4.900)
Laba setelah pajak	3.920

Berdasarkan pencatatan diatas, perusahaan mengakui beban garansi (*warranty expense*) pada periode yang sama dengan transaksi penjualan. Karena itu, perusahaan akan melaporkannya pada laporan laba rugi, terlepas apakah ada klaim atau tidak. Maka hasil pendapatan sebelum pajak sebesar IDR 4.900.

Akan tetapi, untuk pembayaran pajak perhitungannya sedikit berbeda. Otoritas pajak tidak mengizinkan untuk mengakui beban garansi sebelum itu benar-benar terjadi. Maka, perusahaan tidak akan melaporkan beban garansi dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP), seperti dibawah ini :

Keterangan	Nilai
Pendapatan	5.000
Beban garansi	0
PKP	5.000
Utang pajak	1.000 (20% x 5.000)
Laba setelah pajak	4.000

Hasilnya, perusahaan akan membayar pajak sebesar IDR 1.000. Oleh karena itu, perusahaan membayar pajak lebih besar daripada beban pajak penghasilan yang tersajikan pada laporan keuangan sebesar IDR 980. Maka, perusahaan akan mencatat selisihnya sebagai aset pajak tangguhan di laporan keuangan sebesar IDR 20.

2.2.3.2. Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah jumlah PPh yang terhutang untuk periode mendatang (*payable*) sebagai akibat adanya perbedaan sementara (*temporer*) yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*future taxable amount*) dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat beban dilunasi.

Perbedaan temporer yang akan menimbulkan beban pajak tangguhan diantaranya pendapatan bunga termasuk dalam laba akuntansi dalam dasar proporsi waktu, penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba (rugi) kena pajak mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam penghitungan laba akuntansi dan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi dan diamortisasi pada periode masa depan dalam menentukan laba akuntansi. Selain itu, meskipun perbedaan temporer kena pajak dapat diakui sebagai beban pajak tangguhan, kecuali apabila timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill, pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba (rugi) kena pajak.

2.2.3.3. Penentuan Pajak Tangguhan

Penentuan pada Pajak Tangguhan dalam Herdawati (2015) adalah sebagai berikut:

1. Untuk beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), yaitu pengakuan aset atau kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta bahwa adanya kemungkinan pemulihan asset atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak periode mendatang menjadi lebih kecil atau lebih besar. Akan tetapi, apabila akan terjadi pembayaran pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu kewajiban.
2. Untuk aset pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*), yaitu dapat diakui apabila ada kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, harus diakui sebagai suatu asset. Dengan kata lain apabila kemungkinan pembayaran pajak dimasa yang akan datang lebih kecil akan dicatat sebagai asset pajak tangguhan.

2.2.3.4. Pengakuan Pajak Tangguhan

Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai kewajiban (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan).

2.2.3.5. Pengukuran Pajak Tangguhan

Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 46 paragraf 30. Pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi. Yaitu dengan tarif pajak yang secara substansif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis,

pengakuan kewajiban dan aktiva pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan. Serta perbedaan temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

2.2.3.6. Penyajian Pajak Tangguhan

Aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur *non current* (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan.

Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45).

Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

2.2.3.7. Pengungkapan pajak Tangguhan

Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK No. 46 paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
2. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:
 - a) Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.

- b) Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
3. Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
4. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.

2.2.4. Pajak Penghasilan (PPh)

Pada pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.5. Book Tax Difference

Menurut PSAK no.1 paragraf ke 9 (Revisi 2015) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. *Book tax differences* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak (Salsabila, et al, 2016).

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang semena-mena (Martianid dan Persada, 2009). Beberapa prinsip yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi tetapi tidak diakui dalam fiskal, yaitu prinsip konservatisme, prinsip harga perolehan, prinsip pemadanan biaya-manfaat (Resmi, 2017).

Biaya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang laba menurut pajak yang tercantum dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Pasal 9(1). Biaya ini meliputi biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, misalnya pemberian tunjangan kepada karyawan berupa natura atau kenikmatan dll. Dalam

konteks akuntansi perpajakan perbedaan tersebut menimbulkan dua jenis bedanya yaitu tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*temporary differences*).

2.2.5.1. Perbedaan Temporer atau waktu

Perbedaan temporer atau waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak atau laba fiskal yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh dimasa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan laba fiskal akhirnya menjadi sama. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba (Resmi, 2017:379) suatu biaya atau penghasilan yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut Fiskal, atau sebaliknya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Pasal-pasal dalam undang-undang pajak penghasilan (UUPajak No.36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer sebagai berikut:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau

- pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan.
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penilaian persediaan.

Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Persediaan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persetujuan yang diperoleh pertama”.

c. Pasal 11 dan Pasal 11 A

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya, mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Perbedaan temporer akan menimbulkan pergeseran pengakuan penghasilan atau biaya ketahun berikutnya atau ketahun lain. Empat transaksi yang dapat menimbulkan perbedaan waktu/temporer sebagai antara lain (Kiswara, 2009; 128):

- 1) Penghasilan yang masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi: laba bruto penjualan angsuran, laba bruto kontrak jangka panjang, pendapatan dari investasi saham.
- 2) Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi: taksiran biaya garansi/jaminan produk, taksiran kerugian kontrak pembelian, persediaan barang, kerugian piutang dan investasi jangka pendek.
- 3) Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi: sewa, bunga dan persekot.

4) Biaya aaturugipajak sebelum laba akuntansi: depresiasi dan biaya dalam masa konstruksi aktiva tetap (seperti pajak dan bunga).

Perbedaan temporer merupakan refleksi dari kebijakan akrual (*discretionary accruals*) tertentu yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan akrual ini mengakibatkan adanya suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut memungkinkan manajer melakukan manajemen laba, maka perbedaan temporer yang mengandung kebijakan akrual tersebut relevan dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Perbedaan temporer yang dijadikan variabel dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah perbedaan temporer yang terdapat pada catatan laporan keuangan dibagi dengan total aset.

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

- a. Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.
- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk Perusahaan Pertambangan, Leasing, Perbankan dan Asuransi.
- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

- a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan joint

venture tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.

- b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.
- c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan

2.2.5.2. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba Fiskal yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serattidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan dimasa mendatang. Perbedaan permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi dan tidak diakui menurut Fiskal dan sebaliknya. Perbedaan permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut Fiskal (Resmi, 2017:379). Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek

pajak, tetapi secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial, biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada.

a) Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah.
2. Warisan.
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan kongsi.

b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang pajak penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang

tidak boleh dibebankan sebagai biaya, seperti dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
5. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
6. Pajak penghasilan.
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

c) Pasal 18

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan / Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan perhitungan pajak. Beberapa

contoh kewenangan tersebut sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak.
2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.
3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangannya serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Perbedaan permanen terjadi jika perbedaan laba fiskal dan laba komersial tahun tidak akan terpulihkan di kemudian hari sehingga juga terjadi perbedaan fiskal dan laba komersial. Perbedaan permanen dapat positif apabila laba komersial lebih besar daripada laba fiskal (atau negatif apabila laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal). Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif atau negatif merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan perpajakan. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak beda pengaturan yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial secara administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial disebut koreksi negatif. Oleh karena *book tax differences* dan komponennya memiliki nilai yang relevan terhadap laba pada tahun berjalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja masa depan dan menjelaskan keuitas perusahaan, maka perbedaan permanen digunakan sebagai variabel independen yang akan melengkapi perbedaan temporer dalam memprediksi pertumbuhan laba. Perbedaan permanen yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari jumlah perbedaan permanen yang tersaji pada catatan laporan keuangan dibagi dengan total aset.

2.2.6. *Earning Management* atau manajemen laba

Earning Management atau Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu yang sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud tertentu didalamnya dengan batasan-batasan prinsip akuntansi yang mengatur hal-hal yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan. Tindakan yang dilakukan berupa menaikkan dan/atau penurunan laba berjalan yang diperoleh perusahaan tanpa mengakibatkan adanya kenaikan dan/atau penurunan laba ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Davidson *et. al.* Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

Menurut Belkoui dalam Achmad Daengs (2014:201) Manajemen laba adalah suatu kemampuan untuk manipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu contoh yang mencolok dari akuntansi yang dirancang.

Berdasarkan definisi diatas terdapat benang merah dari beberapa definisi tersebut yaitu dengan menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan perusahaan yang akan disajikan.

Dalam praktik manajemen laba dipandang dengan dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang dilakukan salah sifatnya negatif dan tindakan yang dapat dan/atau memang seharusnya dilakukan oleh manajemen perusahaan sifatnya positif. Yang dimaksud negatif jika dilihat manajemen laba sebagai perilaku oportunistik manajer yaitu untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost*, sedangkan yang dimaksud dengan positif jika dilihat manajemen laba dari perspektif *efficient earnings management* yang dimana manajemen laba dapat memberikan manajer untuk fleksibilitas dalam melindungi diri manajemen dan

perusahaan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

2.2.6.1. Teori Manajemen Laba

a. Teori Agensi

Untuk konsep manajemen laba dapat dimulai melalui pendekatan teori agensi. Teori Agensi merupakan *economic rational man* dan kontrak antara prinsipal dengan agen yang dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Dalam pandangan teori agensi adanya pemisah antara prinsipal dengan agen yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dapat mempengaruhi kualitas laba yang disajikan. Prinsipal yang dimaksudkan dalam teori agensi merupakan para pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas serta dana yang memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sedangkan agen yang dimaksudkan merupakan manajemen perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana mestinya yang telah dipercayai para prinsipal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Agen diasumsikan sebagai penerima kepuasan yang didapat tidak hanya dari kompensasi keuangan akan tetapi dapat tambahan dari yang terlibat hubungan suatu agensi seperti halnya dalam waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel sedangkan prinsipal diasumsikan sebagai pihak lain yang hanya tertarik dengan adanya keuntungan yang diperoleh dari yang telah mereka investasikan.

Hubungan antara agen dengan prinsipal memiliki motivasi yang berbeda, jika agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologis sedangkan prinsipal termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan adanya profitabilitas yang selalu meningkat.

Teori agensi mengatakan bahwa dalam praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal

yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan/atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Karena itu, adanya implikasi antara lain pada penata kelolaan korporasi dengan etika bisnis. Yang dimana, agen hanya mengutamakan kepentingan sendiri sedangkan prinsipal yang tidak ingin kepentingannya terganggu.

Dengan adanya perbedaan dalam kepentingan dan informasi antara agen dengan prinsipal yang memacu agen untuk memikirkan bagaimana nominal akuntansi yang dihasilkan dapat lebih maksimalkan kepentingannya. Agen melakukannya dengan cara mempengaruhi nominal akuntansi dengan merekayasa laba atau manajemen laba pada saat menyajikan laporan keuangannya.

b. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang baik dari kejadian yang sebenarnya. Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti memilih kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer tersebut terhadap standar akuntansi yang baru.

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Herdawati (2015) Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. Selain itu, Watt dan Zimmerman dalam Herdawati (2015) juga mengaitkan bahwa *Positive accounting theory* dengan fenomena perilaku oportunistik manajer dengan membentuk tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut, yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*, yakni manajemen akan memilih metode

akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer memperlakukan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun. Hal inilah yang mengakibatkan pemilik mengalami kerugian ganda, yaitu memperoleh informasi palsu dan mengeluarkan sejumlah bonus untuk sesuatu yang tidak semestinya.

2. *Debt Covenant Hypothesis*, yakni manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.
3. *The Political Cost Hypothesis*, yakni bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

Ketiga hipotesis ini sebenarnya merupakan sifat lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan wewenang penegelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan baik. Sebagai penerima wewenang untuk mengelola perusahaan, manajer seharusnya bekerja untuk pemilik.

2.2.6.2. Motivasi Manajemen Laba

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yakni:

1. Motivasi bonus.

Manajer menampilkan profil laba yang sudah direkayasa untuk memperoleh bonus yang maksimal.

2. Motivasi kontrak.

Manajemen melakukan rekayasa laba laporan agar terhindar dari kovenan utang atau kegagalan secara teknis. Profil laba yang ditampilkan adalah sesuai dengan kontrak utang atau konvenannya.

3. Motivasi politik.

Manajer melakukan praktik manajemen laba untuk menghindari *cost* politik. Motivasi ini umumnya dialami oleh manajemen perusahaan yang besar dan strategis karena perusahaan semacam ini mengalami fenomena *cost* politik yang lebih besar dalam bentuk perhatian publik, aturan monopoli, atau biaya *lobbying*.

4. Motivasi pajak.

Manajer melakukan praktik manajemen laba untuk menurunkan atau menaikkan pajak penghasilan sehingga sesuai dengan perencanaan pajak yang dilakukan.

5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*).

Pergantian manajer umumnya akan disertai dengan kemungkinan manajemen laba yang semakin tinggi. Manajer yang akan berhenti atau pensiun tentunya menghendaki memperoleh bonus yang maksimal. Manajer yang kurang sukses melakukan manajemen laba untuk memperbaiki tampilan kinerjanya. Manajer baru melakukan manajemen laba untuk menabung atau menyimpan laba yang akan dimasukkan dalam perhitungan kinerja periode mendatang.

6. Motivasi penawaran saham pedana (*Initial Public Offering (IPO)*).

Manajer perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana melakukan manajemen laba untuk menampilkan profil laba yang lebih baik sehingga harga saham yang diperoleh lebih tinggi.

7. Motivasi informasi privat.

Manajer melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi *private* yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditur.

2.2.6.3. Metoda Manajemen Laba

Dalam melakukan manajemen laba, pemilihan metoda akuntansi harus dilakukan dengan penuh kecermatan oleh manajer agar tidak diketahui oleh pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, manajer harus memiliki strategi agar manajemen laba yang dilakukan tidak diketahui pihak luar. Adapun bentuk- bentuk manajemen laba yang dikemukakan oleh Scott dalam Herdawati (2015) yaitu:

- a. *Taking a bath*, yakni dilakukan manajer dengan cara menggeser biaya *acrued discretionary* periode mendatang ke periode kini atau menggeser pendapatan *acrued discretionary* periode kini ke periode mendatang. Hal ini dilakukan manajer untuk memaksimalkan kompensasi atau bonus yang akan diterimanya pada tahun berikutnya karena menghadapi kenyataan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diterima.
- b. *Income minimization* (minimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk keperluan pertimbangan pajak dengan meminimumkan kewajiban pajak perusahaan.
- c. *Income maximization* (maksimisasi laba), yakni dimaksudkan untuk memaksimalkan bonus manajer, menciptakan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (pertimbangan pasar modal), menunda pelanggaran perjanjian utang, dan manajer dapat memperoleh kendali atas perusahaan.
- d. *Income smoothing* (perataan laba), yakni tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

2.3.Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aset Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap *Earning Management*

Berarti semakin tinggi aset pajak tangguhan suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba akrual. Dengan diberlakukannya PSAK No.46 yang mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aktiva pajak tangguhan yang dapat disebut pencadangan nilai aktiva pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aktiva pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2019) mengatakan bahwa aset pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Aset pajak tangguhan terbukti dapat digunakan sebagai indikator manajemen laba, Jika jumlah aset pajak tangguhan semakin banyak maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Salah satu alasan yang mendasari manajemen melakukan manajemen laba dengan mengatur jumlah Aset pajak tangguhan yakni motivasi adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan dan meminimalisir pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Maka, dari itu terbentuknya hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap earning management

2.Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap *Earning Management*

Adanya beban pajak tangguhan dikarenakan adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Dimana yang dimaksud dengan laba akuntansi yaitu laba yang tersajikan dalam laporan keuangan sebagai kepentingan pihak eksternal. Sedangkan, laba fiskal yaitu nominal laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Perbedaan yang dihasilkan antara laba akuntansi dengan laba fiskal jika hasilnya merupakan selisih negatif dan

terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan dan manajemen perusahaan dapat melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan suatu tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

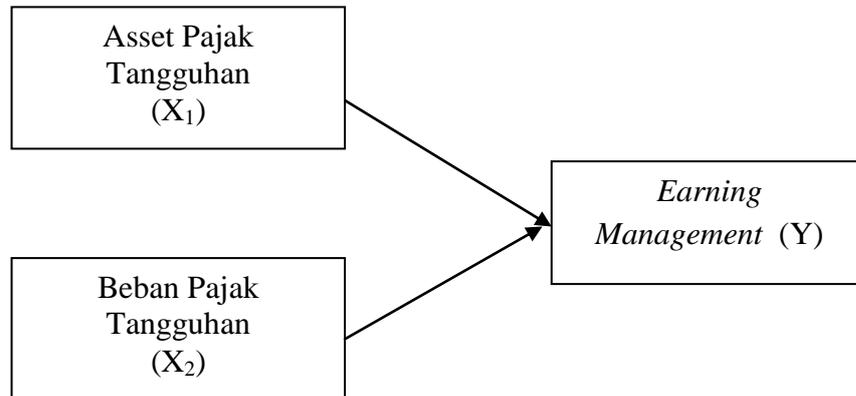
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dkk (2017) mengatakan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang positif terhadap manajemen laba. bahwa semakin besar laba suatu perusahaan maka semakin besar pula beban pajak nya. Maka, dari itu terbentuknya hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap earning management

2.4.Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1

Kerangka konseptual



BAB III

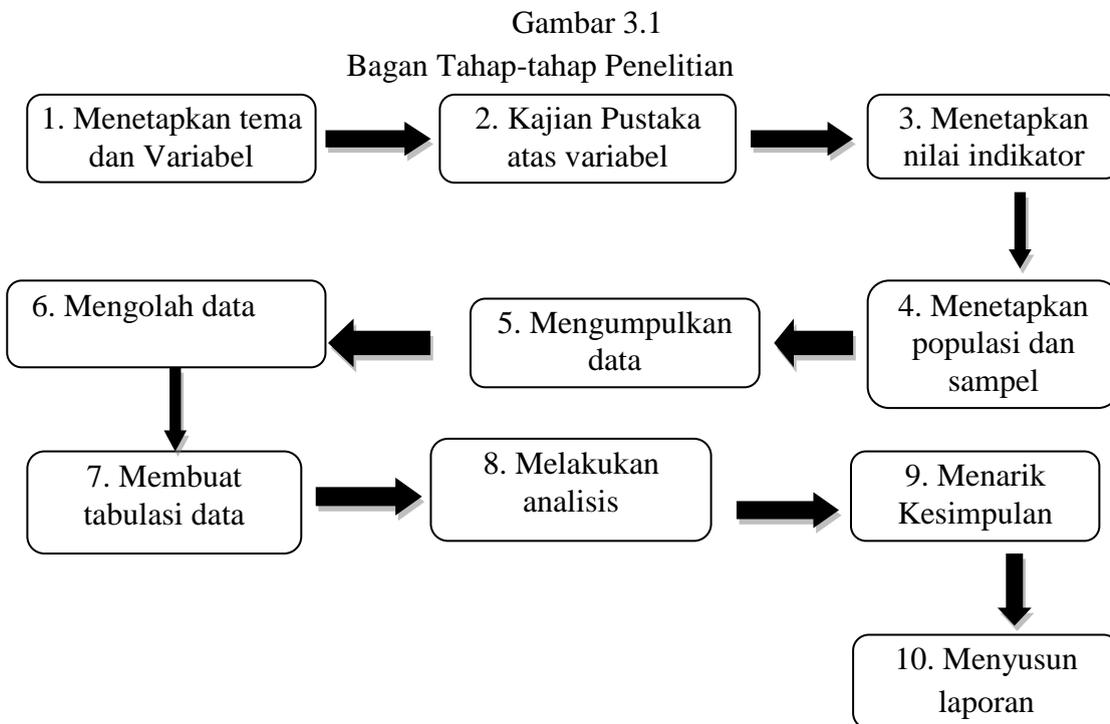
METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang digunakan diperoleh dari akses internet melalui www.idx.co.id yang memuat seluruh data yang dibutuhkan. Jenis perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan periode pengamatan dalam penelitian ini yaitu tahun 2015-2019.

3.2 Tahapan Penelitian

Secara ringkas tahapan penelitian ini digambarkan dalam tabel 3.1 di bawah ini:



3.3 Data dan Sampel Penelitian

3.3.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah dipublikasikan selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, yang diambil melalui situs www.idx.co.id

3.3.2 Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Martono, 2014:81). Sampel yang dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif.

Data yang diperoleh adalah data laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan (*financial report*) perusahaan yang telah diaudit pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah korelasional. Metode pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang tepat mengenai pengaruh pengaruh asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning management*

Kriteria-kriteria peneliti dalam mengambil sampel secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang bergerak pada sub sektor *property, real estate and building construction* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2019.
- b. Perusahaan tersebut tidak mengalami delisting.
- c. Perusahaan tidak IPO diatas tahun 2015.
- d. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan per 31 Desember dengan satuan mata uang rupiah (IDR) yang telah diaudit dan mempublikasikan pada tahun 2015-2019.

- e. Perusahaan melaporkan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan pada tahun 2015-2019.
- f. Perusahaan mendapatkan laba pada tahun 2015-2019.

Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan jasa sub sektor <i>property, real estate and building construction</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019	81
2	Perusahaan yang mengalami delisting tahun 2015-2019	(7)
3	Perusahaan yang IPO diatas tahun 2015	(27)
4	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun-tahun tertentu	(8)
5	Perusahaan yang tidak melaporkan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan pada tahun 2015-2019	(29)
6	Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2015 – 2019	(2)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi criteria	8
	Jumlah tahun penelitian	5
	Total data laporan keuangan yang digunakan penelitian	40

Sumber: Data diolah Peneliti, 2020

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Sample Penelitian

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk
2	WIKA	Wijaya Karya Tbk
3	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
4	CTRA	Ciputra Development Tbk
5	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
6	MDLN	Modernland Realty Tbk
7	MTLA	Metropolitan Land Tbk
8	SMRA	Summarecon Agung Tbk

3.4. Definisi dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur, serta parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Terikat (Dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu earning management

Manajemen laba merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan atau menurunkan laba. Untuk mendeteksi dan mengetahui manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat menggunakan rumus yang dikembangkan dengan model Jones Modifikasi seperti berikut ini :

2.1 Menentukan nilai total akrual dengan cara :

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2.2 Menentukan nilai parameter α_1 , α_2 dan α_3 menggunakan rumus jones model dengan cara :

$$TA_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 \Delta REV_{it} + \alpha_3 PPE_{it} + \epsilon_{it}$$

Kemudian untuk menskalakan data, semua variabel tersebut dibagi dengan set tahun sebelumnya (A_{it-1})

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

2.3 Menghitung nilai NDA dengan cara :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

2.4 Menghitung nilai *Discretionary Accrual* dengan cara :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu

1. Aset Pajak Tangguhan (X_1)

Aset pajak tangguhan merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya adalah jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta akibat adanya saldo kerugian yang mendapat kompensasi untuk periode mendatang. Dalam penelitian ini aset pajak tangguhan sebagai

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{aktiva pajak tangguhan } it}{\text{aktiva pajak tangguhan } t}$$

variabel bebas yang dapat diukur dengan perubahan nilai aset pajak tangguhan pada periode t dengan t-1 dibagi dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t.

2. Beban Pajak Tangguhan (X_2)

$$DTE_{it} = \frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{total asset } t - 1}$$

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul dari akibat adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Yang dimana, laba akuntansi adalah nominal laba yang ada didalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal sedangkan laba fiskal adalah nominal laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan, standar akuntansi yang berlaku dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi yang berlaku lebih memberikan leluasaan bagi manajemen untuk menentukan prinsip akuntansi dan asumsi dibandingkan yang diterapkan dan berlaku menurut perpajakan. Perhitungan mengenai beban pajak tangguhan dihitung dari indikator yang membobot beban pajak tangguhan dengan total aset. Hal ini, dilakukan untuk pembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 sehingga memperoleh nilai yang terhitung dengan proposional.

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Ukur Data
Aset Pajak Tangguhan (X_1)	$APT_{it} = \frac{\Delta \text{aktiva pajak tangguhan } it}{\text{aktiva pajak tangguhan } t}$	Rasio

Beban Pajak Tangguhan (X ₂)	$DTE_{it} = \frac{\text{beban pajak tangguhan}}{\text{total asset } t - 1}$	Rasio
Earning Management (Y)	$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$	Rasio

3.5 Strategi Penelitian

Strategi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat asosiatif. Karena dalam penelitian ini meneliti hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam hal ini asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan yaitu keduanya sebagai variabel independen, serta *earning management* sebagai variabel dependen.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id>. Data yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan tersebut akan peneliti olah menggunakan software Eviews Versi 9.0.

3.6 Model Pengujian Hipotesis

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *multiple regression* atau regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 APT_i + \beta_2 BPT_i + e$$

Keterangan :

Y : Perubahan earning management perusahaan I pada tahun ke -t

α : Konstanta.

β : Koefisien regresi.

APT_i : Aset Pajak Tangguhan

BPT_i : Beban Pajak Tangguhan

e : error (kesalahan Pengganggu)

Setelah persamaan regresi terbebas dari asumsi dasar maka langkah selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

3.7. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisi regresi data panel. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis yang digunakan terdiri dari dua jenis pengujian, yaitu uji koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikan parameter individual (Uji statistik t)

3.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini mengukur berapa sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Penelitian ini menggunakan adjusted R^2 karena variabel dependent yang digunakan dalam model penelitian lebih dari satu.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent.

3.7.2 Uji t

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan distribusi t sebagai uji statistik (Hasan, 2008:145). Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent secara baik. Uji ini dilakukan dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Kriteria pengujian hipotesis dengan uji t adalah:

- a. $\text{Prob} < 0,05$ maka variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.
- b. $\text{Prob} > 0,05$ berarti variabel independent tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent.

3.7.3 Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama. Pengujian hipotesis dengan menggunakan distribusi F. Dengan $\alpha = 5\%$, kriteria pengujian dengan uji F adalah :

- a. Jika nilai probabilitas $\text{prob} \leq 0,05$ = berarti ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen, berarti model dapat digunakan.
- b. Jika nilai probabilitas $\text{prob} \geq 0,05$ = berarti tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.8 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan kemudian diolah untuk menghasilkan data masing-masing variabel tiap perusahaan sampel menggunakan program Ms. Excel 2007. Lalu data tiap sampel akan diolah melalui program EViews Versi 10.0 untuk dilihat statistik deskriptifnya dan diuji apakah data sampel tersebut layak dan bagus untuk menguji hipotesis.

3.8.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah bertujuan untuk menguji hipotesis (pernyataan sementara) dari penelitian yang bersifat deskriptif. Penerapan ini sangat bergantung dari skala pengukurannya, seperti: nominal, ordinal, dan interval/rasio. (Siregar, 2013:126).

Statistik Deskriptif adalah statistik yang menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik dari data yang diolah oleh peneliti, yang dilihat dari:

- a. Mean
Mean adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut.
- b. Minimum
Minimum adalah nilai terkecil dari variabel-variabel yang telah diuji.
- c. Maksimum
Maksimum adalah nilai terbesar dari variabel-variabel yang telah diuji.
- d. Standard Deviasi
Standar Deviasi digunakan untuk menilai *disperse* rata-rata atau sampel. Setelah rata-rata diketahui maka perlu ditentukan sebaran datanya, makin kecil sebaran berarti data semakin sama. Jika sebaran bernilai nol, maka nilai semua data adalah sama. Semakin besar sebarannya maka nilai yang ada akan semakin bervariasi.

3.8.2. Pendekatan Model Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* tahunan (*annual*) selama 5 tahun yaitu 2015 – 2019 dan data *cross section* yaitu sebanyak 8 perusahaan manufaktur yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Menurut Hsiao dalam (Ghozali, 2013:232), menyatakan bahwa penggunaan data panel memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*.

1. Data panel dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antar variabel independen sehingga dapat menghasilkan estimasi yang efisien.
2. Data panel dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja.
3. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Data panel biasa disebut data longitudinal atau data runtun waktu silang (*cross-sectional time series*), dimana banyak kasus (orang, perusahaan, Negara dan lain-lain) diamati pada dua periode waktu atau lebih yang diindikasikan dengan penggunaan data *time series*.

Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Menurut Agus Widarjono (2007) metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section*, yaitu :

1. Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Keunggulan regresi data panel menurut Wibisono (2005) dalam Lucky Lukman (2015) antara lain :

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang ulang (time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dengan keunggulan tersebut maka sebenarnya tidak harus dilakukannyapengujian asumsi klasik dalam model data panel seperti yang disampaikan oleh Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011, Lucky Lukman (2015). Namun demikian, masih banyak para peneliti berpendapat lain dan masih menggunakan uji asumsi klasik. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tetap menyajikan cara penghitungan uji asumsi klasik.

Terdapat tiga metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain:

1. *Common Effect Model / Pooled Least Square (PLS)*

Teknik yang digunakan dalam metode *Common Effect / Pooled Least Square (PLS)* hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

2. *Fixed Effect Model*

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Fixed Effect*. Metode dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep.

Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar waktu (*time invariant*). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

3. *Random Effects Model*

Teknik yang digunakan dalam Metode *Random Effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan *Metode Generalized Least Square (GLS)*.

3.9. Pemilihan Model Data Panel

Dari tiga pendekatan metode data panel tersebut, langkah selanjutnya adalah memilah dan memilih model yang terbaik (*best model*) untuk analisis data panel. Pengujian yang dilakukan adalah menggunakan *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan LM

1. *Chow test* atau *Likelyhood test*

Uji Chow ini digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*, cara menghitungnya dengan menggunakan hasil regresi *Fixed Effect Model*. Hipotesis dalam uji ini adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan Statistik *Chi-Square*, jika probabilitas dari hasil uji Chow-test lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga pengujian selesai sampai pada Uji Chow saja. Akan tetapi jika probabilitas dari hasil uji Chow-test lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga pengujian masih berlanjut pada Uji Hausman.

2. *Hausman test*

Uji Hausman dapat dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan nilai Probability Cross-section Chi-square nya lebih kecil dari 0,05. Uji Hausman membandingkan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*, cara menghitungnya dengan menggunakan hasil regresi *Random Effect Model*.

Hipotesis dalam pengujian ini adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan Statistik *Chi-Square*, jika probabilitas dari hasil uji Hausman-test lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Akan tetapi jika probabilitas dari hasil uji Hausman-test lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

3. *Langrange - Multiplier (LM) Test*

Langrange-Multiplier (Pengganda Lagrange) digunakan Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji ini untuk memilih apakah model Common Effect atau Random Effect yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data panel. Nilai LM hitung dibandingkan dengan nilai chi-squared tabel dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak jumlah variabel independen (bebas) dan alfa atau tingkat signifikan sebesar 5%. Ketentuan untuk uji LM jika nilai Prob. Chi-squared $> 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila Prob. Chi-squared $< 0,05$ telah terjadi autokorelasi. Pengujian ini dengan hipotesis, sebagai berikut :

H_0 = Jika Chi Square $> 0,05$, maka terima H_0 yaitu CEM lebih tepat.

H_1 = Jika Chi Square $< 0,05$, maka Tolak H_0 , yaitu REM lebih tepat.

3.10. Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metoda deskriptif kuantitatif dan statistik deskriptif. Metoda deskriptif kuantitatif adalah metoda analisis data yang menggambarkan perhitungan angka-angka dan dijelaskan hasil-hasil perhitungan berdasarkan literatur yang ada.

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Gambaran atau deskripsi variabel tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum.

Yang dimaksud dengan mean adalah nilai rata-rata dari setiap variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian. Standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa dekat titik data ke rata-rata nilai sampel. Minimum merupakan nilai yang paling rendah digunakan dalam setiap penelitian. Sedangkan, maksimum adalah nilai yang paling tinggi digunakan dalam setiap penelitian.

3.11. Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan pengujian regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi:

3.11.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji data yang berdistribusi normal dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dimana peneliti menggunakan dengan cara histogram.

Terdapat dua cara untuk melihat apakah data terdistribusi normal. Pertama, jika nilai Jarque-Bera < 2 , maka data sudah terdistribusi normal. Kedua, dengan nilai probability $< \alpha 0,05$ (lebih kecil dari 0,05) maka data tidak berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai probability $> \alpha 0,05$ (lebih besar dari 0,05) maka data berdistribusi normal.

3.11.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Multikolinearitas muncul jika diantara variabel independen memiliki korelasi yang tinggi dan membuat kita sulit untuk memisahkan efek suatu variabel independen terhadap variabel dependen dari efek variabel lainnya. Hal ini disebabkan perubahan suatu variabel akan menyebabkan perubahan variabel pasangannya karena korelasi yang tinggi. Beberapa indikator dalam mendeteksi adanya multikolinearitas, diantaranya (Gujarati, 2006):

1. Nilai R_2 yang terlampaui tinggi, (lebih dari 0,80) tetapi tidak ada atau sedikit t-statistik yang signifikan.
2. Nilai F-statistik yang signifikan, namun t-statistik dari masing-masing variabel bebas tidak signifikan.

Untuk menguji masalah multikolinearitas dapat melihat matriks korelasi dari variabel bebas, jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas (Gujarati, 2006).

3.11.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Dalam pengamatan ini uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji *White*, dengan menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen.

Kriteria untuk pengujian Uji *White* dengan $\alpha = 5\%$, adalah:

Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ varian terdapat heteroskedastisitas.

Jika nilai $\text{sig} \geq 0,05$ varian tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.11.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan 1 dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Untuk mendeteksi ada tidaknya auto korelasi adalah dengan menggunakan metode uji *Breusch-Godfrey* atau lebih dikenal dengan Uji *Langrange-Multiplier* (Pengganda Lagrange). Ketentuan untuk uji Uji *Langrange-Multiplier* (Pengganda Lagrange) jika nilai $\text{Prob. Chi-squared} > 0,05$ maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila $\text{Prob. Chi-squared} < 0,05$ telah terjadi autokorelasi.

3.12. Jadwal Kegiatan dan Realisasi Biaya

3.12.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Minggu Ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan Studi	■											
2	Mencari Literatur		■	■									
3	Pengumpulan Data			■	■	■							
4	Mengolah Data					■	■	■					
5	Menganalisis Data							■	■	■			
6	Menyusun Laporan									■	■		
7	Penyusunan Luaran Penelitian										■	■	
8	Seminar dan Publikasi											■	■
9	Mengumpulkan Laporan												■

3.12.2 Realisasi Biaya

Kegiatan	Biaya	Presentase
Pembuatan proposal penelitian	600.000	17%
Pengumpulan data	1.750.000	50%
Pengolahan dan analisis data	625.000	18%
Seminar dan laporan penelitian	725.000	21%
Jumlah	3.500.000	100%

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Jumlah perusahaan yang bergerak didalam sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction yang terdaftar (*listed*) di BEI pada tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebanyak 81 perusahaan. Berdasarkan tehnik *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Jumlah dari laporan tahunan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 81 laporan tahunan perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction selama 5 tahun dimulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang berasal dari 8 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai perusahaan yang akan diteliti. Berikut ini pada table 4.1 dibawah ini adalah hasil nilai perusahaan.

Tabel 4.1
Hasil Nilai Perusahaan

No.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	Manajemen Laba	Aset Pajak Tangguhan	Beban Pajak Tangguhan
1	Surya Semesta Internusa Tbk. [S]	2015	-0,086676387	1,221216325	0,157646682
		2016	0,245198656	1,757477752	0,005468448
		2017	-1,93987812	0,070631215	0,004075291
		2018	1,538678646	0,976020808	0,002772296
		2019	-1,626391678	1,054385929	0,002340507
2	Wijaya Karya (Persero) Tbk. [S]	2015	0,025318383	0,933773957	0,000702154
		2016	-0,107571033	0,693548265	0,001606467
		2017	-1,672644774	1,409829262	0,001004521
		2018	0,215482277	1,223250427	0,002367488
		2019	1,296977417	1,213486784	0,002765208
3	Agung Podomoro Land Tbk. [S]	2015	0,134329864	1,050220312	0,015176728
		2016	0,082414778	0,813285625	0,018489953
		2017	-0,596500679	1,109607118	0,008145312
		2018	0,605119554	1,384271224	0,007170209
		2019	0,351652497	0,547167854	0,008363165

4	Ciputra Development Tbk. [S]	2015	0,108503428	0,204152098	0,003464808
		2016	0,238431338	7,052197802	0,001205695
		2017	-0,88734199	0,501655629	0,000954308
		2018	0,332860261	1,45573675	0,000797923
		2019	0,360443395	1,456824698	0,000726627
5	Kawasan Industri Jababeka Tbk. [S]	2015	0,049449379	1,213211495	0,012611091
		2016	-0,161196544	0,621862283	0,015894434
		2017	-0,408091363	1,230799702	0,008894731
		2018	0,053569376	0,919363656	0,008261712
		2019	0,130850534	1,137179064	0,008258791
6	Modernland Realty Tbk. [S]	2015	0,152581866	1,168615304	0,004277649
		2016	-0,067290301	1,019821205	0,003406411
		2017	-0,053029881	1,073084891	0,004241938
		2018	-0,064185536	1,267737726	0,004961894
		2019	0,06668687	2,938162955	0,004862453
7	Metropolitan Land Tbk. [S]	2015	0,397295131	1,756732453	0,000363318
		2016	0,234376547	0,076703608	0,000554176
		2017	-0,978192319	0,947130164	0,000826562
		2018	0,83006747	1,122710882	0,000752887
		2019	-0,399022736	1,369793882	0,000744133
8	Summarecon Agung Tbk. [S]	2015	0,359286968	1,09901503	0,072474435
		2016	0,146981839	0,641439858	0,000122136
		2017	-0,052396236	1,065407106	0,000166949
		2018	0,044649187	0,055646989	0,001486947
		2019	0,405478482	0,249997524	0,000135436

Sumber: Data diolah Peneliti, 2020

4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 pengamatan perusahaan Sub Sektor Property, Real Estate and Building Construction selama periode 2015-2019. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas data dari suatu variabel yang diteliti dengan meliputi variabel independen yaitu Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan, serta yang menjadi variabel dependen yaitu *Earning Management*. Statistika deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdapat nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, dan maksimum. Standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa dekat titik data ke rata-rata nilai sampel. Minimum merupakan nilai yang paling rendah digunakan dalam setiap penelitian. Sedangkan, maksimum adalah nilai yang paling tinggi digunakan dalam setiap penelitian.

Dari hasil pengujian statistik deskriptif atas ketigavariabel tersebut dengan sampel penelitian berjumlah 36, maka diperoleh hasil statistik deskriptif sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	<i>EARNING MANAGEMENT</i> Y	ASET PAJAK TANGGUHAN X ₁	BEBAN PAJAK TANGGUHAN X ₂
Mean	-0,017343	1,177579	0,009964
Maximum	1,538679	7,052198	0,157647
Minimum	-1,939878	0,055647	0,000122
Std. Dev.	0,678025	1,088702	0,026658
Observations	40	40	40

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020.

Dari hasil statistik deskriptif diatas pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa untuk variabel dependen dan independen sebagai berikut :

1. *Earning Management* (Y)

Pada table 4.2 terlihat bahwa variabel dependenyaitu *Earning Management* yang diukur menggunakan DA (*Discretionary Accruals*) menunjukkan nilai minimum sebesar -1.939878dimiliki oleh Surya Semesta Internusa Tbkpada tahun 2017. Nilai maksimum sebesar 1.538679dimiliki oleh Surya Semesta Internusa Tbkpada tahun 2018. Serta rata-rata perusahaan pada sub sektor *property, real estate and building construction*yang melakukan *earning management* sebesar -0,017343yang artinya bahwa perusahaan sub sektor *property, real estate and building construction* di Bursa Efek Indonesia tidak semuanya perusahaan melakukan *earning management*. Kemudian *earning management* dalam penelitian ini memiliki standar deviasi sebesar0,678025. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2015-2019 besarnya yang melakukan *earning management* belumdand atau tidak semuanya melakukan *earning management* pada laporan keuangannya yang disajikan, sementara nilai standar deviasi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya maka menunjukkan bahwa simpangan data*earning management* relatif kurang baik.

2. Aset Pajak Tangguhan (X_1)

Variabel independen berupa aset pajak tangguhan diperoleh nilai minimum sebesar 0,055647 yang dimiliki oleh Summarecon Agung Tbk pada tahun 2018.

Sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Ciputra Development Tbk pada tahun 2016 sebesar 7.052198.

Nilai rata-rata aset pajak tangguhan yang dimiliki penelitian ini untuk perusahaan pada sub sektor property, real estate and building construction sebesar 1,177579. Kemudian standar deviasi aset pajak tangguhan sebesar 1,088702. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2015-2019 nilai rata-rata yang dihasilkan merupakan nilai positif maka terindikasinya bahwa aset pajak tangguhan yang mengimplikasikan perusahaan sub sektor property, real estate and building construction melaporkan laba fiskal lebih tinggi dari laba komersial.

3. Beban Pajak Tangguhan (X_2)

Variabel independen selanjutnya adalah beban pajak tangguhan yang menunjukkan nilai minimum sebesar 0,000122 dimiliki oleh Summarecon Agung Tbk pada tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,157647 dimiliki oleh Surya Semesta Internusa Tbk pada tahun 2015. Kemudian nilai rata-rata beban pajak tangguhan sebesar 0,009964 dan standar deviasi beban pajak tangguhan dalam penelitian ini sebesar 0,02665. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik selama tahun 2015-2019 dengan nilai rata-rata yang dihasilkan berupa nilai positif yang artinya bahwa perusahaan pada sub sektor property, real estate and building construction terimplikasi bahwa perusahaan melaporkan laba komersial lebih tinggi daripada laba fiskal.

4.2.2 Pemilihan Model

4.2.2.1. Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood Ratio Test dilakukan untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Commont Effect Model* (CEM). Pengujian ini melalui prosedur uji F statistic yang dibandingkan dengan F tabel serta melihat probabilitas signifikansi, dengan hipotesis :

H_0 = Jika Chi Square $> 0,05$, maka yang diterima H_0 adalah CEM.

H_1 = Jika Chi Square $< 0,05$, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Hasil pengujian Hasil pengujian *Likelihood Ratio Test (Chow Test)* akan dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil pengujian *Likelihood Ratio Test (Chow Test)*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.294882	(7,30)	0.9506
Cross-section Chi-square	2.661674	7	0.9144

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020

Berdasarkan hasil pengujian diatas diketahui nilai *cross-section* F statistic sebesar 0.294882. Maka F tabel dapat ditentukan menggunakan Ms.Excel dengan rumus *Insert Function* sebagai berikut :

$$F \text{ tabel} = \text{FINV}(\text{probability}, \text{deg_freedom1}, \text{deg_freedom2})$$

$$F \text{ tabel} = \text{FINV}(\alpha, n-1, nt-n-k)$$

$$F \text{ tabel} = \text{FINV}(\alpha, 40-2-1)$$

$$F \text{ tabel} = \text{FINV}(0.05, 37)$$

$$F \text{ tabel} = 2,026192$$

Dengan demikian diperoleh perbandingan nilai F statistic sebesar 0.294882 lebih kecil dari daripada F tabel sebesar 2,026192 serta probabilitas yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.9506 > 0,05$) maka kesimpulan dari hasil pengujian *Likelihood Ratio Test (Chow Test)* adalah diterima H_0 .

Berdasarkan tabel 4.3 pada hasil *chow test, common effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas (*P-value*) cross section F sebesar $0.9506 \geq 0,05$ maka hipotesis **H_0 diterima dan H_1 ditolak** yang berarti model ***Common Effect Model (CEM)*** lebih tepat digunakan.

4.2.2.2. Hausman Test

Hausman Test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis:

$$H_0 = \text{Jika Chi Square} > 0,05, \text{ maka terima } H_0 \text{ yaitu REM lebih tepat.}$$

$$H_1 = \text{Jika Chi Square} < 0,05, \text{ maka Tolak } H_0, \text{ yaitu FEM lebih tepat.}$$

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Pengujian *Hausman Test*.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.212184	2	0.5455

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews* versi 9.0, 2020.

Berdasarkan tabel 4.5 pada hasil *hausman test*, *random effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas (*P-value*) *cross section random* sebesar $0.5455 \geq 0,05$ maka hipotesis **H₀ diterima dan H₁ ditolak** yang berarti model ***Random Effect Model (REM)*** lebih tepat digunakan

4.2.2.3. *Langrange - Multiplier Test*

Langrange-Multiplier (Pengganda *Langrange*) digunakan Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Uji ini untuk memilih apakah model *Commont Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data panel. Setelah diperoleh nilai LM hitung, nilai LM hitung dibandingkan dengan nilai *chi-squared* tabel dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak jumlah variabel independen (bebas) dan alfa atau tingkat signifikan sebesar 5%.

Ketentuan untuk uji LM jika nilai Prob. *Chi-squared* > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi, sedangkan apabila Prob. *Chi-squared* < 0,05 telah terjadi autokorelasi. Pengujian ini dengan hipotesis, sebagai berikut :

H₀ = Jika Chi Square > 0,05, maka terima H₀ yaitu CEM lebih tepat.

H₁ = Jika Chi Square < 0,05, maka Tolak H₀, yaitu REM lebih tepat.

Berikut ini adalah hasil dari uji *Langrange Multiplier (LM)*:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Lagrange - Multiplier Test

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.433833 (0.0187)	13.45735 (0.0000)	15.89118 (0.0000)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020.

Berdasarkan tabel 4.5 pada hasil uji *Lagrange Multiplier test*, *random effect model* vs *common effect model* diatas, diperoleh *cross section Breusch-pangan* ≤ 0.05 yaitu $0.0187 \leq 0.05$ maka hipotesis **H₀** ditolak dan **H₁** diterima yang berarti model **Random Effect Model (REM)** lebih tepat digunakan.

4.2.3. Kesimpulan Pemilihan Model

Berdasarkan hasil pemilihan model yang telah dilakukan yang terdiri dari uji *lagrange multiplier*, uji *chow* dan uji *hausman*. Maka dapat disimpulkan metode estimasi regresi data panel yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Kesimpulan Pengujian

No.	Metode	Pengujian	Hasil
1	<i>Chow Test</i>	CEM vs FEM	<i>Common Effect Model</i>
2	<i>Hausman Test</i>	REM vs FEM	<i>Random Effect Model</i>
3	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	REM vs CEM	<i>Random Effect Model</i>

Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel untuk ketiga model data panel diatas memiliki tujuan untuk memperkuat kesimpulan metode estimasi regresi data panel yang dipakai. Dan berdasarkan tabel diatas maka ditarik kesimpulan bahwa yang dipakai adalah **Random effect model(REM)** yang akan digunakan untuk menganalisis data lebih lanjut dalam penelitian ini.

4.2.4 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel yang digunakan dalam pengujian hipotesis yaitu menguji pengaruh asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning management* yaitu variabel independen : asset pajak tangguhan (X_1), beban pajak tangguhan (X_2) terhadap variabel dependen yaitu *earning management* (Y)

Dari dua pengujian sebelumnya yaitu *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test (LM)* , didapatkan kesimpulan bahwa data yang memiliki lebih sesuai menggunakan **Random effect model (REM)** Berikut merupakan *output* EViews untuk regresi data panel menggunakan *Random effect model (REM)*.

Tabel 4.7
Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/11/20 Time: 09:08
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116178	0.179951	0.645610	0.5225
X1	0.078104	0.109090	2.715954	0.0385
X2	-2.688688	40.455263	-0.004579	0.8780

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020.

Berdasarkan output analisis regresi data panel pada tabel 4.6 diatas, maka dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Earning Management = 0.116178 + 0.078104x_1 - 2.688688x_2$$

Berdasarkan persamaan regresi data panel diatas, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0.116178 berarti hal ini dengan adanya pengaruh asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan maka akan terjadinya kenaikan *earning management* hingga mencapai nilai sebesar 0.116178 atau dengan kata lain jika variabel independen dianggap konstan (nilai = 0), maka nilai *earning management* tetap sebesar 0.116178
2. Variabel asset pajak tangguhan (X_1) memiliki nilai koefisien positif 0.078104 yang mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu satuan

asset pajak tangguhan maka *earning management* akan bertambah sebesar 0.078104

3. Variabel beban pajak tangguhan (X_2) memiliki nilai koefisien negative 2.688688 yang mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu satuan beban pajak tangguhan maka *earning management* akan bertambah berkurang sebesar 2.688688

4.2.5 Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R-Square*. Nilai *Adjusted R-Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berikut merupakan *output* EViews untuk uji koefisien determinasi penelitian ini.

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.079689	Mean dependent var	-0.017343
Adjusted R-squared	0.196404	S.D. dependent var	0.678025
S.E. of regression	0.741626	Akaike info criterion	2.452374
Sum squared resid	16.50026	Schwarz criterion	2.874593
Log likelihood	-39.04747	Hannan-Quinn criter.	2.605035
F-statistic	0.288630	Durbin-Watson stat	3.256392
Prob(F-statistic)	0.972654		

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020.

Berdasarkan *output* Eviews pada table diatas menunjukkan besarnya *Adjusted R-Squared* sebesar 0.196404 hal ini berarti 19,64%.Maka, artinya seluruh variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar dari variasi variabel Sedangkan sisanya (100% - 19,64% = 80,36%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model regresi yang ada dalam penelitian ini.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikansi.

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu $\alpha = 5\% = 0,05$.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya ;
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan jumlah pengamatan sebanyak ($n = 40$), jumlah variabel independen dan dependen sebanyak ($k = 2$), maka *degree of freedom* (df) = $n - k - 1 = 37$, dimana tingkat signifikansinya sebesar $\alpha = 0,05$. Maka *ttabel* dapat ditentukan menggunakan Ms Excel dengan rumus *Insert Fuction* sebagai berikut :

$t_{tabel} = \text{TINV}(\text{probability}, \text{deg_freedom})$

$t_{tabel} = \text{TINV}(0.05, 37)$

$t_{tabel} = 2,026192$

Berikut ini hasil pengujian atas regresi hipotesis hasil uji statistic-t :

1. **Hasil Uji Hipotesis 1:** Pengaruh asset pajak tangguhan terhadap *earning management*

Tabel 4.9
Hasil Regresi Uji Statistik t– variabel pengaruh asset pajak tangguhan terhadap *earning management*(X_1)

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/11/20 Time: 09:08
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116178	0.179951	0.645610	0.5225
X1	0.078104	0.109090	2.715954	0.0385

Sumber: Hasil pengolahan data dengan Eviews versi 9.0, 2020.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*. Hasil dari pengujian regresi pada tabel 4.8, menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.715954 > 2.026192$) Sedangkan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0385 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*., **diterima**.

2. Hasil Uji Hipotesis 2: Beban pajak tangguhan terhadap *earning management*

Tabel 4.10
Hasil Regresi Uji Statistik t– variabel Beban pajak tangguhan terhadap *earning management* (X₂)

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/11/20 Time: 09:08
Sample: 2015 2019
Periods included: 5
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 40
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.116178	0.179951	0.645610	0.5225
X2	-2.688688	40.455263	-0.004579	0.8780

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews* versi 9.0, 2020.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan terhadap *earning management*. Hasil dari pengujian regresi pada tabel 4.9, menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($-0.004579 < 2.026192$). Sedangkan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.8780 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *earning management*. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*, **ditolak**.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh asset pajak tangguhan terhadap *earning management*

Pada hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa asset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*, **diterima**. Hal tersebut merepresentasikan terjadi adanya beberapa dorongan motivasi oleh manajemen untuk melakukan dengan cara diantaranya meminimalkan pembayaran pajak, agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan dengan cara memperbesar jumlah aset pajak tangguhan yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Bahwa aset pajak tangguhan dapat dijadikan celah untuk melakukan *earning management*. Bahwa manajer mempertimbangkan secara detail kemungkinan resiko-resiko dan kerugian yang lebih besar untuk merekayasa komponen aset pajak tangguhan dalam upaya meningkatkan laba tersebut. Sehingga apabila aset pajak tangguhan semakin naik maka *earning management* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan semakin tinggi.

Variabel aset pajak tangguhan yang berpengaruh terhadap manajemen laba mencerminkan bahwa perusahaan sampel penelitian memanfaatkan celah dari kebijakan yang ada dalam PSAK No.46. manajer memanfaatkan cadangan aset pajak tangguhan pada laporan keuangan komersil untuk melakukan tindakan manajemen laba. Bahwa pajak yang seharusnya dibayarkan pada periode sekarang dialihkan pada periode mendatang dengan demikian laba perusahaan pun akan meningkat karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy (2016), Wisudaningtyas (2019) dan Dita (2018) yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.3.2 Beban pajak tangguhan terhadap *earning management*

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa H₂ yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan pengaruh terhadap *earning management*, **ditolak**. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap *earning management*. Perusahaan Sub Sektor *Property, Real Estate and Building Construction* di Indonesia yang memanfaatkan celah untuk memmanage labanya dengan menggunakan besarnya beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi fiskalnya akan terkoreksi dalam laporan laba rugi fiskal. Peraturan perpajakan memberikan batasan lebih ketat dalam penghitungan pajaknya hanya mengakui besarnya penghasilan atau biaya pada saat di terima atau dikeluarkan sebagai dasar dalam penghitungan laba rugi fiskalnya. Dengan kata lain perpajakan hanya mengakui beban pajak pada periode tersebut dan tidak mengakui adanya beban pajak tangguhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia (2016), Felicia (2016) dan Lucy (2016) yaitu beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *earning management*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap *earning management* studi empiris pada perusahaan sub sektor property, real estate and building construction yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertama menunjukkan bahwa Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management*. Hal ini Aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *earning management* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sub sektor property, real estate and building construction periode 2015-2019. Hasil dari pengujian regresi, menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($2.715954 > 2.026192$) Sedangkan hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0385 < 0.05$). Koefisien aset pajak tangguhan bernilai 0.0385 yang berarti ketika terjadi kenaikan aset pajak tangguhan sebesar satu-satuan maka akan menaikkan *earning management* sebesar angka koefisien tersebut yaitu 0.0385. Hal ini didasari karena adanya jumlah PPh yang terpulihkan pada periode akan datang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dikurangkan dari beban dalam perhitungan laba fiskal dan sisa kompensasi kerugian. Maka, apabila aset pajak tangguhan semakin naik maka *earning management* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan semakin tinggi dan semakin besar aset pajak tangguhan maka semakin besar pula perusahaan melakukan *earning management*
2. Variabel kedua dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *earning management*. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *earning management* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sub sektor property, real estate and building construction dengan periode 2015-2019. Hasil dari pengujian regresi menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel ($-0.004579 < 2.026192$). Sedangkan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.8780 > 0.05$).

Koefisien beban pajak tangguhan bernilai positif sebesar 0.8780, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi dan nilai t hitung bernilai negatif sebesar -0.004579. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap *earning management* disebabkan beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi perusahaan dalam melakukan *earning management*. Karena bila perusahaan menurunkan labanya pengaruhnya terhadap beban pajak tangguhan kecil sehingga bila ingin mendeteksi *earning management* dalam perusahaan melalui beban pajak tangguhan tidak efektif karena beban pajak tangguhan tidak dapat menggambarkan bahwa perusahaan tersebut melakukan *earning management*

5.2 Saran dan Keterbatasan

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka peneliti dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya guna untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji masalah yang sama hendaknya melakukan penelitian dengan periode yang lebih terkini dan dengan sub sektor perusahaan yang berbeda.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti Beban Pajak Kini, *Leverage*, *Debt to Equity Ratio*.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini sekiranya dapat menambahkan variabel tambahan seperti variabel moderating atau intervening.

PENUTUP

Demikian laporan ini diajukan dengan harapan kegiatan tersebut bisa mendapat persetujuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, September 2021
KETUA TEAM PENELITIAN

(Sulistyowati, SE, M.Ak, BKP)
NIDN 0326097701

DAFTAR PUSTAKA

- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif "Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Resmi, S., 2017. *Teori & Kasus Perpajakan*. 10 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.idx.co.id>
- <https://www.bps.go.id>
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Maulana, Y, P (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, e-ISSN: 2460-0585*, Volume 8, Nomor 7, Juli 2019.
- Agustina, M, R & Nera, M (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aktiva Pajak Tangguhan dan AkruaL Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi, ISSN: 2356-4385*, Volume 6, No. 2, Agustus 2019.
- Putra, Y. M & Kurnia (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 8, Nomor 7, Juli 2019. ISSN: 2460-0585. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya..
- Lucy,. C. F. (2016). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013). *JOM Fekom*, 3(1), 1150-1163.
- Sylvia, dkk. (2016). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 11(2), 105-120.
- Luqman, H., & Gian, A. P. (2019). *The Influence of the Tax Charges, Tax-Deferred and Planning, Against Earnings Management. International Conference on Economics, Management, and Accounting*, 3(26), 727-743.
- Marlim, M., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 3(6), 3-17.

- Fatimatu, C., H. (2017). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2016). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 15-25.
- Timuriana, T & Rizki, R (2015). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)* Volume 1 No. 2 Tahun 2015, Hal. 12-20
- Lutfi, dkk. (2017). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisaksi*, ISSN: 2339-0832, 4(2), 191-206.
- Ningtyas (2019). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 34-60.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46: *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50: *Penyajian dan Pengukuran Laba*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55: *Pengakuan dan Pengukuran Laba*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Herdawati. (2015). Analisis Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.
- Belkaoui, A., R. (2014). *Accounting Theory*. Edisi Lama. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham Fahmi. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Mitra Wacana Media. Jakarta
- Dermawan Wibisono, 2005. Metode Penelitian & Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika
- Gujarati, Damodar N. 2006. Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kiswara, Endang. 2011. "Akuntansi Perpajakan". Semarang: BP UNDIP.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

LAMPIRAN

No.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	Manajemen Laba	Aset Pajak Tangguhan	Beban Pajak Tangguhan
1	Surya Semesta Internusa Tbk. [S]	2015	-0,086676387	1,221216325	0,157646682
		2016	0,245198656	1,757477752	0,005468448
		2017	-1,93987812	0,070631215	0,004075291
		2018	1,538678646	0,976020808	0,002772296
		2019	-1,626391678	1,054385929	0,002340507
2	Wijaya Karya (Persero) Tbk. [S]	2015	0,025318383	0,933773957	0,000702154
		2016	-0,107571033	0,693548265	0,001606467
		2017	-1,672644774	1,409829262	0,001004521
		2018	0,215482277	1,223250427	0,002367488
		2019	1,296977417	1,213486784	0,002765208
3	Agung Podomoro Land Tbk. [S]	2015	0,134329864	1,050220312	0,015176728
		2016	0,082414778	0,813285625	0,018489953
		2017	-0,596500679	1,109607118	0,008145312
		2018	0,605119554	1,384271224	0,007170209
		2019	0,351652497	0,547167854	0,008363165
4	Ciputra Development Tbk. [S]	2015	0,108503428	0,204152098	0,003464808
		2016	0,238431338	7,052197802	0,001205695
		2017	-0,88734199	0,501655629	0,000954308
		2018	0,332860261	1,45573675	0,000797923
		2019	0,360443395	1,456824698	0,000726627
5	Kawasan Industri Jababeka Tbk. [S]	2015	0,049449379	1,213211495	0,012611091
		2016	-0,161196544	0,621862283	0,015894434
		2017	-0,408091363	1,230799702	0,008894731
		2018	0,053569376	0,919363656	0,008261712
		2019	0,130850534	1,137179064	0,008258791
6	Modernland Realty Tbk. [S]	2015	0,152581866	1,168615304	0,004277649
		2016	-0,067290301	1,019821205	0,003406411
		2017	-0,053029881	1,073084891	0,004241938
		2018	-0,064185536	1,267737726	0,004961894
		2019	0,06668687	2,938162955	0,004862453
7	Metropolitan Land Tbk. [S]	2015	0,397295131	1,756732453	0,000363318
		2016	0,234376547	0,076703608	0,000554176
		2017	-0,978192319	0,947130164	0,000826562
		2018	0,83006747	1,122710882	0,000752887
		2019	-0,399022736	1,369793882	0,000744133
8	Summarecon Agung Tbk. [S]	2015	0,359286968	1,09901503	0,072474435
		2016	0,146981839	0,641439858	0,000122136
		2017	-0,052396236	1,065407106	0,000166949
		2018	0,044649187	0,055646989	0,001486947
		2019	0,405478482	0,249997524	0,000135436

